

EVALUASI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL DI DESA TLAMBAH KECAMATAN KARANGPENANG KABUPATEN SAMPANG MADURA

Mita Devi Sukmawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
mitasukmawati@mhs.unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Program Keaksaraan Fungsional ini sangatlah penting bagi masyarakat penyandang buta aksara. Dengan adanya program ini masyarakat terutama mereka yang tinggal di Desa terpencil akan terbantu dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Pada pembelajaran Keaksaraan Fungsional Fungsional ini juga bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat yang merata agar mampu berperan di tengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Mayoritas masyarakat Kabupaten Sampang bermata pencaharian sebagai petani, sebagian kecil pedagang. Rata-rata kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah dengan angka prestasi buta aksara sangat tinggi. sehingga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Keaksaraan Fungsional (SK).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Keaksaraan Fungsional di Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang Madura. Fokus dari penelitian ini adalah menggunakan Teori Evaluasi William N.Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketetapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dokumentasi.

Program keaksaraan Fungsional ini merupakan suatu pembelajaran yang diberikan diluar sekolah untuk masyarakat penyandang buta aksara. Terutama bagi mereka yang tidak bisa menulis, membaca dan menghitung. Hasil dari Evaluasi Program Keaksaraan Fungsional ini masih belum dikatakan efektif. Karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan surat keterangan melek aksara (SUKMA).

Kata Kunci : Evaluasi, Program, Keaksaraan, Fungsional

Abstract

This Functional Literacy Program is very important for people with illiteracy. With this program the community, especially those who live in remote villages, will be helped and increase public awareness of education. In learning Functional Literacy this is also part of an effort to educate the lives of the people who are evenly distributed so that they are able to play a role in the midst of the community that is in accordance with their abilities in their fields. The majority of the people of Sampang Regency work as farmers, a small proportion of traders. The average quality of human resources (HR) is low with illiteracy rates very high. so that the Head of the Sampang District Education Office issued a Decree (SK) Number 49 of 2007 concerning education management standards by the Functional Literacy (SK) education unit

The purpose of this study is to describe the Evaluation of the Functional Literacy Program in Tlambah Village, Karangpenang District, Sampang Madura Regency. The focus of this study is to use William N.Dunn's Evaluation Theory, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, determination. The type of research used is descriptive with qualitative approach. Data collection used observation, interview, documentation

This Functional Literacy Program is a learning Provided outside of school for illiterate people. Especially for those who cannot write, read, and count. The results of the Evaluation of the Functional Literacy Program are not optimal because there are still many people who have not received literacy certificates (SUKMA).

Keywords : Evaluation, Functional, Literacy, Program

PENDAHULUAN

Pendidikan berkaitan erat hubungannya dengan manusia atau makhluk hidup yang berakal sebagai pendidik atau peserta didik. Pendidikan adalah bagian penting dalam pembentukan seorang manusia menjadi seseorang yang lebih baik dari berbagai aspek sisi kehidupan. Pendidikan merupakan hak dasar untuk semua individu, bahkan untuk segala situasi dan kondisi dari suatu individu tersebut karena pendidikan ialah fondasi untuk pembelajaran seumur hidup. Dengan memperoleh ilmu pengetahuan di harapkan individu mampu mengembangkan potensi yang di miliki sehingga dapat bersaing dengan masyarakat menurut Anjarsary (2015: 4). Oleh karena itu pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi semua individu, termasuk untuk masyarakat penyandang buta aksara (PBA). Setiap warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pendidikan. Hal tersebut untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya dengan diberikan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. ditegaskan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa utamanya pada bidang pendidikan yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum juga dalam pembukaan UUD 1945.

Pendidikan di Indonesia memiliki 3 jalur pendidikan antara lain pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dan terakhir pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab menurut (syulfasah : 2016). Diantara ketiga jalur tersebut yang berhubungan dengan buta aksara, yaitu pendidikan non formal, dimana fungsi utama dari pendidikan non formal untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Sasaran Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (UU No. 20 tahun 2003).

Beberapa upaya pun dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan berbagai penerapan pola peningkatan mutu di Indonesia telah banyak dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan, akan tetapi masih belum dapat secara langsung memberikan efek perbaikan mutu

tersebut. Namun salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia adalah dengan merubah atau memperbaiki kurikulum dan beberapa program peningkatan pendidikan. Salah satunya yakni program perbaikan pendidikan adalah Program Keaksaraan Fungsional.

Keaksaraan Fungsional adalah sebuah usaha pendidikan luar sekolah dalam membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan dalam menulis, membaca bahkan menghitung untuk tujuan yang pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya, untuk peningkatan mutu taraf hidupnya menurut (Novita:2014). Prioritas usia penyandang buta aksara adalah usia 15-59 tahun pada pemberantasan buta aksara melalui program keaksaraan fungsional. Pengertian buta aksara sendiri yakni adalah orang yang tidak memiliki kemampuan dalam membaca, menulis dan menghitung. (Depdiknas, 2008.3).

Jelaslah dari sini bahwa Pemerintah dan masyarakat harus bahu membahu dalam melaksanakan pendidikan, yang diawali dengan pemberantasan buta aksara. Buta aksara sendiri merupakan salah satu contoh dari rendahnya pendidikan di Indonesia. Buta aksara sendiri merupakan jendela untuk bisa melihat dunia. Artinya, jika orang bisa membaca, dia bisa melihat dunia baru dan segala perkembangannya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta teknologi informasi (TI). Itu berarti bahwa pemerintah belum sepenuhnya bisa mencapai tujuan tersebut. Walaupun sudah dilakukan upaya-upaya untuk memberantas buta aksara, tetapi buta aksara masih banyak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori dari William N. Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Sedangkan pada Evaluasi Kebijakan terdiri dari 2 pendekatan, yaitu Evaluasi Semu dan Evaluasi Formal. Kegiatan program Keaksaraan Fungsional ini masuk pada pendekatan evaluasi formal dengan dengan tipe Evaluasi Sumatif. Yang artinya evaluasi yang digunakan untuk memantau pencapaian tujuan formal setelah suatu kebijakan tersebut di terapkan untuk jangka waktu tertentu. Sebab program keaksaraan fungsional ini sudah berjalan dan sudah selesai. Maka perlunya evaluasi untuk melihat seberapa efektif kegiatan atau pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Tambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang Madura. Pada saat tehnik pengumpulan data peneliti menggunakan tiga tahap yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketika semua data sudah terkumpul maka data-data tersebut dianalisis menggunakan tiga tahap yaitu melalui pencatatan, pengklasifikasian, dan terakhir adalah verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis Evaluasi Program Keaksaraan

Fungsional di Desa Tambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Karangpenang Kabupaten Sampang Madura menggunakan teori dari William N. Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Adapun dua pendekatan evaluasi kebijakan yakni evaluasi sumatif dan evaluasi formal. Program Keaksaraan Fungsional ini masuk pada pendekatan evaluasi formal dengan tipe evaluasi sumatif karena program Keaksaraan Fungsional ini sudah berjalan dan sudah selesai. Program Keaksaraan Fungsional ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang bermitra kerja dengan Pihak LSM di Kabupaten Sampang. Program ini dibawah naungan Kabid PAUD & PNFI, yang memiliki fungsi sebagai 1) Bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan informal yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan, pelaksanaan dan pembinaan serta fasilitasi penerapan standar teknis bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal. 2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang memiliki fungsi tersendiri.

Suatu kebijakan publik dapat dikatakan berhasil atau tidak, dapat dilihat dari implementasinya. Jika implementasinya tidak berhasil atau kurang maksimal maka perlu adanya evaluasi untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi ketidakberhasilan program tersebut. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dari kebijakan publik yang telah ditentukan. Untuk mengevaluasi Program Keaksaraan Fungsional ini menggunakan teori William N. Dunn (2003) yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas dalam suatu program atau kebijakan diukur dari apakah suatu kebijakan atau program yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan artinya apabila program telah berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka program tersebut belum dikatakan efektif. Selain itu efektivitas juga diukur dari kegiatan yang dilakukan selama Program Keaksaraan Fungsional. Dalam pelaksanaannya, Program Keaksaraan Fungsional di Desa Tambah belum juga efektif karena di dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Dalam kegiatan Program Keaksaraan Fungsional ini masih banyak dari warga belajar yang masih belum sepenuhnya bisa menulis, menghitung maupun membaca. Salah satu faktor yang menjadi hambatan ketidakberhasilannya salah satunya modul hanya digunakan oleh Tutor dan warga belajar tidak mendapatkan modul tersebut. Seharusnya modul tersebut bisa diperbanyak dengan difotocopi atau yang lain. Hal ini untuk bisa mendorong warga belajar tetap belajar sekalipun program ini sudah selesai. Mereka masih mempunyai buku panduan untuk mereka bisa tetap belajar.

Tujuan dari program Keaksaraan Fungsional ini masih belum memberikan hasil yang optimal. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah warga belajar dapat diketahui bahwa mereka tidak semuanya mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Tetapi untuk kebutuhan belajar mereka (warga belajar) sudah terpenuhi hal ini dilakukan untuk menunjang proses belajar mereka. Dari hasil wawancara dengan warga belajar mereka merasakan dampak yang positif. Meski dampak yang diperoleh terbilang kecil tetapi bisa bermanfaat. Pada dasarnya warga belajar sebelum adanya program ini mereka memang sangat kesulitan dalam membaca dan menghitung maupun dalam menulis karena memang mereka tidak mengenyam pendidikan sama sekali dari kecil atau memang hanya lulusan SD saja. Sehingga pengetahuan mereka kurang dan perlu adanya dorongan untuk bisa membuat mereka belajar dan memahami pentingnya pendidikan.

2. Efisiensi

Efisiensi program dapat diketahui dari jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau pelayanan. Dalam pelaksanaannya Program ini KF ini tidak menarik biaya untuk warga belajar bisa mengikuti program ini, akan tetapi warga belajar diberikan hadiah juga fasilitas dalam mengikuti Program Keaksaraan Fungsional. Selain itu tutor dalam melaksanakan kegiatan ini juga harus memiliki kemampuan untuk bisa mengajar para warga belajar dengan baik adapun beberapa modul untuk menjadi buku panduan selama melakukan proses belajar-mengajar. Jadi Program KF ini sangat efisien karena tidak ada penarikan biaya untuk bisa mengikuti program ini.

Dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah Warga Belajar (WB) di Desa Tambah Dusun Rakmerakan dapat diketahui bahwa mereka tidak merasa keberatan dan terbebani dengan menjadi WB program ini. Karena tidak ada penarikan biaya apapun yang ada para warga belajar bisa mendapatkan fasilitas belajar seperti ATK dan hadiah setelah mengikuti program ini. Selain itu warga belajar juga mengatakan bahwa sangat terbantu dengan adanya tutor karena mereka juga dibimbing dan diajarkan secara maksimal untuk bisa memahami pelajaran yang diajarkannya. Tutor tidak hanya menerangkan di depan saja akan tetapi juga beberapa dari tutor yang duduk dibelakang untuk menemani serta membimbing secara langsung warga belajar yang belum mengerti dengan apa yang sudah dijelaskan di depan. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang tutor dari Program ini mengatakan bahwa warga belajar tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk mengikuti dan selama proses pembelajaran. Sebaliknya kita kan memberikan hadiah untuk warga belajar yang sudah mengikuti program ini serta fasilitas yang diberikan selama proses pembelajaran.

Tutor juga mengatakan pelayanan selama proses belajar mengajar juga sudah dilakukan sebaik mungkin dengan membimbing dan menuntun mereka secara perlahan untuk bisa membaca, menulis dan

menghitung. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa semangat yang tinggi untuk warga belajar bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Akan tetapi dengan begitu beberapa dari warga belajar yang masih sering alpa dan sering tidak hadir atau tidak mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Alasan mereka karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan atau anak, padahal waktu yang diberikan juga terbilang singkat. Setiap pertemuan dilakukan selama seminggu dua kali selama enam bulan.. Dengan demikian Program ini program KF ini belum efisien karena masih terdapat beberapa hambatan yaitu dalam proses kehadiran dan waktu pelaksanaan Program yang masih dirasa kurang oleh warga belajar. Mengingat usia mereka yang sudah tidak lagi produktif dan membutuhkan waktu yang seharusnya lebih kontinyu untuk pemahaman mereka dalam proses belajar. Banyak pula dari warga belajar yang mengatakan bahwa mereka sering lupa dengan apa yang sudah diajarkannya. Terlebih tidak ada ada fasilitas buku yang di dapat setelah proses pembelajaran ini berakhir. Jadi mereka (warga belajar) hanya belajar dari buku tulis mereka saja setelah program ini selesai.

3. Kecukupan

Kecukupan suatu kebijakan atau program adalah seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Artinya kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang mampu memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam pelaksanaannya, Program KF di Desa Tambah secara keseluruhan telah mencukupi kebutuhan warga belajar dalam proses pembelajarannya seperti memberikan fasilitas ATK maupun pemberian hadiah setelah mereka mengikuti program Keaksaraan Fungsional ini. Selain itu dengan jumlah tutor dalam pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional ini juga menjadi pendorong keberhasilan Program. Jumlah tutor dalam kegiatan ini terdapat 15 tutor yang tersebar dalam 15 kelompok. Setiap satu kelompok terdapat 10 orang warga belajar dengan jumlah keseluruhan 150 warga belajar yang mengikuti Program Keaksaraan Fungsional.

Berdasarkan penelitian pihak LSM maupun tutor mereka sudah merasa tersukupi dan puas dengan fasilitas yang sudah diberikan. Dan itu membantu dan mempermudah warga belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu juga ada kegiatan praktek yang membuat warga belajar mengerti bukan hanya dari teori saja akan tetapi praktek secara langsung seperti pembuatan bakso. Hal ini dilakukan dengan harapan jika mereka (warga belajar) ini bisa mengerti dan paham pembuatannya mereka bisa berjualan bakso. Kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar sudah terpenuhi dan mereka sudah merasa puas dengan fasilitas yang mereka terima baik ATK dalam menunjang proses belajar mereka juga terdapat 15 tutor untuk membimbing mereka dalam proses belajar. Dan pernyataan tersebut dibenarkan oleh ketua LSM selaku penyelenggara program ini bahwa warga belajar merasa senang dan puas dengan semua

fasilitas dan ketelatenan dari tutor maupun fasilitas yang di berikan oleh program ini.

4. Pemerataan

Perataan dalam kebijakan atau program menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Perataan itu adil, artinya menghasilkan distribusi dan manfaat untuk merata. Dalam pelaksanaannya Program KF di Desa Tambah perataan belum terbilang merata. Berdasarkan wawancara dengan Warga Belajar (WB) dari Dusun Rakmerakan, Dusun Angsara Barat dan Timur mereka merasakan manfaatnya yang luar biasa karena tidak perlu jauh-jauh dan tidak perlu untuk ke Dusun sebelah untuk bisa mengikuti proses pembelajaran karena lokasi pelaksanaan sudah dekat dengan rumah mereka masing-masing. Akan tetapi hasil yang diperoleh mereka masih belum terbilang merata karena beberapa dari mereka yang sudah mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

Hal ini dikarenakan mereka belum sepenuhnya mengerti dan memahami yang Selma ini sudah diajarkan. Salah satu faktor yang membuat tidak meratanya SUKMA yang diperoleh oleh warga belajar dikarenakan warga belajar jarang hadir dengan alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Maka dari hal itu warga belajar bisa tertinggal pelajaran. Juga ditambah dengan kurangnya buku atau modul yang seharusnya bisa mereka miliki sendiri. Hal ini untuk meminimalisir ketidakpahaman mereka. Karena jika mereka memiliki buku atau modul di rumah mereka bisa belajar sendiri di rumah. Hal ini dibenarkan oleh penyelenggara Program itu sendiri karena demi mempermudah WB dalam belajar dan tidak perlu repot dan kesulitan untuk bisa hadir dan mengikuti dengan rajin dan baik program KF tersebut dan terkait perolehan SUKMA yang tidak sampai separuh dari warga belajar yang mendapatkan hal itu karena mereka (warga belajar) belum lulus dalam ujian yang sudah dilakukan diakhir pertemuan. Bagaimana ujian bisa lulus jika mereka (warga belajar) sering absen di setiap pertemuan saat proses belajar-mengajar berlangsung. Karena ini juga menjadi salah satu faktor mereka dalam memahami materi pembelajaran. Jika warga belajar sering absen dalam setiap pertemuan maka warga belajar juga sering ketinggalan di setiap materi yang sudah diajarkan atau disampaikan oleh tutor.

5. Responsivitas

Responsivitas kebijakan atau program berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan warga belajar mengenai pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, program Keaksaraan Fungsional telah menjawab respon warga belajar mengenai buta aksara di Desa Tambah. Disisi lain tanggapan Warga belajar sangat senang dengan

adamnya program ini karena mereka sudah tdiak kesulitan lagi dalam membaca, menulis dan menghitung. Akan tetapi juga tidakhanya dilihat dari tanggapan dari masyarakat atau warga belajar saja. Respon ini juga bisa dilihat dari kehadiran. Jumlah kehadiran warga belajar yang masih sering absen membuat mereka para warga belajar banyak tertinggal dalam proses belajar-mengajar. Mereka sangat sulit untuk menyisihkan waktu hanya dua jam untuk mengikuti proses belajar-mengajar ini. Akan tetapi beberapa dari mereka juga sudah merasakan dampak yang dirasakan dari adanya program ini seperti mereka sudah bisa membuka warung dan juga konter dari bebbberapa warga belajar.

Namun juga banyak dari mereka yang merasa kurangnya waktu yng di berikan untuk proses belajar karena usia yang kurang produktif dan perlunya adanya waktu yang lebih kontinyu untuk pelaksanaan Program KF ini. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah warga belajar mereka mengatakan hal yang sama bahwa mereka senang dengan adanya program ini juga menyayangkan waktu yang di berikannya kurang. Seperti yang di tegaskan oleh salah seorang tutor dari Program KF. Selain waktu yng kurang, warga belajar yang juga kurang memanfaatkan waktu yang sudah diberikan. Mereka tidak bisa menggunakan wkatu 6 bulan untuk belajar dengan baik dengan tidak sering absen dalam setiap pertemuan. Jika mereka bisa sering hadir dalam setiap pertemuan atau bisa full dalam setiap kelompok, hal ini akan berdampak pada pengetahuan mereka juga.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam kebijakan atau program menurut William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya. Mislanya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak negative dan positif atau dimungkinkan alternative yang diraskaan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kbeijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis. Dalam pelaksanaannya. Program KF di Desa Tlambah secara keseluruhan telah tepat dilaksanakan di Desa Tlambah yang artinya telah tepat sasaran dilaksanakan di daerah yang memang tingkat buta kasanya yang masihh tinggi. di Desa Tlambah sendiri masih banyak masyarakat yang belum bisa menulis dan membaca maupun menghitung. Hal ini di karenakan mereka tidak sekolah atau hanya tamat dari lulusan SD saja.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tlambah dapat diketahui bahwa dengan adanya program KF ini telah telah tepat sasaran dilaksanakan di Desa Tlamabah. Menurut mereka dnegan adanya program ini mampu memberi manfaat banyak terhadap mereka penyandang buta aksara dan bahkan memberikan dampak yang baik kepada mereka. yang semula mereka memang tidak bisa membaca, menulis juga menghitung akan tetapi semenjaka adanya program Keaksaraan Fungsional ini mereka sudah mulai ada peningkatan. Meski tidak bnayak tapi setidaknya mereka sudah bisa membaca, menulis dan menghitung. Hal ini mereka bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari harinya yang juga bisa memberinya mnafaat karena sudah mengikuti program Keaksaraan Fungsional ini. Contoh kecil

beberapa dari mereka yang sudah mampu mengembangkan warung kecil mereka. sekarang mereka sudah bisa banyak menjual bahan bahan makanan atau jajanan. Bukan hanya itu saja beberapa dari mereka yang bisa membaca sudah bisa mencari ruangan sendiri tanpa bertanya pada orang lain.

PENUTUP

Simpulan

mengacu pada proses pembelajaran yang diterapkan, permasalahan dan tujuan penelitian serta dihubungkan dengan analisis hasil dan pembahasan, secara garis besar dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai proses pembelajaran yang biasanya diarahkan dengan belajar membaca, menulis dan menghitung, dalam Program KF ini bukan hanya materi tapi juga melakukan teori dengan praktek secara langsung dan proses pembelajaran ini menggunakan bahasa ibu (bahasa Madura) dan cara mengajar yang tidak menggurui. Dalam pelaksanaannya Program KF di Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang belum efektif karena hanya sebagian dari warga belajar yang mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Tujuan dari program Keaksaraan Fungsional sendiri belum memberikan hasil yang optimal. Seperti tujuan dari program Keaksaraan Fungsional ini yang pertama yakni, memperluas pelaksanaan PBA, namun buktinya masih terdapat beberapa dusun yang belum mendapat bagian dalam kegiatan KF ini. Kedua, dan juga tidak sampai setengah dari 150 warga belajar yang mengikuti program Keaksaraan Fungsional ini yang sudah mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara.

Program KF ini juga terbilang sudah efisien karena tidak ada pemungutan baiya untuk Warga Belajar (WB). Dan tutor-tutor dalam kegiatan program Keaksaraan Fungsional yang sudah memiliki kemampuan dalam mengajar untuk bisa membimbing serta mengajar dengan baik kepada warga belajar. Akan tetapi ada beberapa hambatan yakni terkait waktu pelaksanaan yang terbilang masih kurang untuk kegiatan program Keaksaraan Fungsional ini. Karena melihat rata-rata dari warga belajar yang sudah tidak produktif lagi. Dimana mereka membutuhkan program yang lebih kontinyu untuk kedepannya. Semua gratis juga termasuk pemberian fasilitas untuk warga belajar. Dan dengan adanya tutor-tutor yang ikut berkontribusi dalam kegiatan program Keaksaraan Fungsional ini.

Semua Warga Belajar sudah merasa tercukupi dengan diberikannya fasilitas seperti ATK, dan hadiah di akhir proses pembelajaran. Mereka sudah sangat bersyukur dan merasa senang dengan fasilitas yang sudah di berikan. Tetapi bukan hanya dari ATK saja namun juga dengan adanya jumlah tutor yang mencukupi. tutor dalam kegiatan program Keaksaraan Fungsional ini berjumlah 15 tutor. Mereka (warga belajar) juga merasa terbantu dengan adanya tutor. Karena mereka bisa dibimbing dengan baik. program ini belum merata ke semua Dusun yang ada di Desa Tlambah karena masih ada beberapa dusun di Desa Tlambah yang tidak ada kegiatan pelaksanaan Keaksaraan Fungsional. Akan tetapi respon dari WB merasa senang dan terbantu

dengan adanya program ini. Walaupun hanya beberapa dari mereka saja yang merasakan dampak yang luar biasa dengan adanya program ini. Juga banyak dari mereka yang merasa kurang dengan hasil yang mereka (WB) peroleh mengingat waktunya yang terbilang Kurang. Selain itu juga banyak dukungan dari tokoh masyarakat untuk program Keaksaraan Fungsional ini sendiri. Program ini juga sudah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar belum bisa menulis, menghitung dan membaca. Seperti yang sudah disampaikan salah satu warga belajar yang merasakan manfaat dengan adanya program Keaksaraan Fungsional ini mereka sudah mulai ada kemampuan dalam menulis, membaca dan menghitung. Program ini juga sudah tepat dilakukan di Desa Tlamabah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang Madura dan juga sudah tepat sasaran.

SARAN

- a. Dalam penyampaian informasi kepada warga belajar, tutor diharapkan lebih kreatif lagi, sehingga pesan yang disampaikan menarik untuk diterima oleh warga belajar. Hal ini diperlukan karena program KF ini mayoritas mereka dengan usia yang sudah tidak produktif (tua)
- b. Masyarakat perlu dibimbing secara berkelanjutan supaya setelah program ini selesai masyarakat/warga belajar tidak lupa dengan apa yang didapatkan selama 6 bulan belajar dalam Program Keaksaraan Fungsional
- c. Perlu adanya dukungan pemerintah secara langsung untuk memotivasi warga belajar secara langsung, bisa dilakukan secara periodik melalui monitoring ke lokasi pembelajaran
- d. modul yang digunakan dalam proses pembelajaran bisa diperbanyak (fotocopy) dan dibagikan kepada warga belajar, agar warga belajar tidak hanya sekedar mendengarkan dan menulis apa yang ada di papan tapi juga bisa memiliki

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarsary dkk. 2015. *Penyelenggaraan pendidikan inklusi pada jenjang SD,SMP* Malang. Universitas Negeri Malang
- Dunn, William 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Novita sari Nila. 2014. *Evaluasi program keaksaraan dasar metode batung bingar studi kualitatif pada kelompok belajar melati binaan UPTD SKB Mojoangung*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Dunn, William N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya
- Sulfasyah, Jamaluddin Arifi. 2016. *Implikasi Pendidikan Non formal pada Remaja*. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Fokusmedia

Hang Mujahir, 1996, *metode penelitian kualitatif, Remaja Rosda Karya*, Bandung.

Depdikbud, 1998. *Buku pedoman Tutor Keaksaraan fungsional*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat.

Komar, siong. 2006. *filsafat pendidikan non formal*. Bandung: Grafika